



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215
Telepon (0721) 474828 Hotline 081369694488**

Nomor : 339 /S/XVIII.BLP/9/2023 Bandar Lampung, 26 September 2023
Perihal : Keterangan terkait Pemenuhan **Kepada Yth.**
Bukti Pelaksanaan pada e-monev **Ketua Komisi Informasi**
Keterbukaan Informasi Publik **Provinsi Lampung**
Tahun 2023 di Lingkungan BPK **di**
Perwakilan Provinsi Lampung **Bandar Lampung**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (e-monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 se-Provinsi Lampung oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung, bersama ini kami sampaikan keterangan terkait pemenuhan bukti pelaksanaan pada beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Lingkungan BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Parameter Kualitas Informasi

- 1) Kuesioner e-monev I.D.2. Pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi yang tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai tender: tidak terdapat pengadaan dimaksud.
- 2) Kuesioner e-monev I.D.3. Pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi yang tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana tercantum dalam LPSE dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau tender gagal: tidak terdapat pengadaan dimaksud.
- 3) Kuesioner e-monev II.2. Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka belum ditetapkan sebagai keputusan.
- 4) Kuesioner e-monev II.3. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa belum ditetapkan sebagai keputusan.

2. Parameter Jenis Informasi

- 1) Kuesioner e-monev I.1.f. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender, dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023: disesuaikan dengan jenis pengadaan barang dan jasanya sehingga beberapa jenis dokumen tidak terdapat dalam pekerjaan tersebut.
- 2) Kuesioner e-monev I.2.b. Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2021 - 2023: belum ada kebijakan dari Biro Umum dan Biro Keuangan BPK RI dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan Perjanjian Kemitraan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 3) Kuesioner e-monev I.2.c. Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2021 - 2023: belum ada kebijakan dari Biro Umum dan Biro Keuangan BPK RI dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan Perjanjian Swakelola di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 4) Kuesioner e-monev I.2.d. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2021-2023: belum ada kebijakan dari Biro Umum dan Biro Keuangan BPK RI dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan Perjanjian Swakelola di BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 5) Kuesioner e-monev I.5. Dokumen jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2021-2023 merupakan klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan BPK Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Tahun 2021.

3. Parameter Pelayanan Informasi

- 1) Kuesioner e-monev III.2. Keputusan mediasi dalam sengketa informasi: tidak terdapat sengketa informasi Tahun 2021-2023 (sampai dengan September 2023)
- 2) Kuesioner e-monev III.3. Menjalankan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap: tidak terdapat sengketa informasi Tahun 2021-2023 (sampai dengan September 2023)
- 3) Kuesioner e-monev IV.2 s.d IV.5. Nama website PPID Pelaksana Kedirjenan/ sederajat: hanya terdapat 1 (satu) PPID Pelaksana setingkat Kedirjenan/ sederajat, yaitu PPID BPK Pusat (Tingkat Sekretaris Jenderal)
- 4) Kuesioner e-monev IV.7 dan 9. PPID Pelaksana Tingkat Kantor Wilayah/Cabang - Nama website Unit atau Cabang: hanya terdapat 1 (satu) PPID Pelaksana Tingkat Kantor Wilayah/Cabang, yaitu PPID BPK Perwakilan Provinsi Lampung

- 5) Kuesioner e-monev IV.8 dan 10. PPID Pelaksana Tingkat Kantor Wilayah/Cabang - Nama website kantor wilayah atau Cabang: hanya terdapat 1 (satu) PPID Pelaksana Tingkat Kantor Wilayah/Cabang, yaitu PPID BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

4. Parameter Komitmen Organisasi

- 1) Kuesioner e-monev I.2.d. SOP Pendokumentasian informasi publik masih dalam proses reviu Direktorat Litbang BPK RI sehingga belum ditetapkan sebagai keputusan.

5. Parameter Sarana Prasarana

- 1) Kuesioner e-monev I.8 poin (a) s.d (e). Seluruh website PPID Pelaksana Tingkat Kedirjenan terintegrasi dengan website utama Kementerian/Lembaga/Badan. Sebutkan beberapa diantaranya: hanya terdapat 1 PPID Pelaksana setingkat Kedirjenan/ sederajat, yaitu PPID BPK Pusat (Tingkat Sekretaris Jenderal) yang terintegrasi dengan seluruh website BPK Perwakilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Yusnaden S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA
NIP 1970120219960320